



Perbandingan Sistem Pendidikan Tinggi Program Sarjana di Australia dan Inggris

Novianita Achmad^{1*}, Abdul Haris Panai², Sitti Roskina Mas³, Zulystiawati⁴

¹Jurusan Matematika, Universitas Negeri Gorontalo, Bone Bolango, 96119, Indonesia

^{2,3,4}Jurusan Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo, Kota Gorontalo 96128, Indonesia

Info Artikel

*Penulis Korespondensi.

Email: novianita.achmad@ung.ac.id

Submit: 30 Mei 2024

Direvisi: 23 Juli 2024

Disetujui: 30 Juli 2024



Under the licence
CC BY-NC-SA 4.0

Diterbitkan oleh:



Copyright ©2024 by Author(s)

Abstrak

Pendidikan tinggi di Australia dan Inggris telah mengalami transformasi signifikan dalam beberapa dekade terakhir, menghadapi tantangan inklusi, representasi, dan efisiensi. Di Australia, perubahan signifikan terjadi dalam pendanaan pendidikan tinggi, beralih ke model yang lebih fleksibel dan berbasis kinerja, sementara Inggris masih bergelut dengan isu elitisme dan kesenjangan sosial. Kedua negara menghadapi tantangan dalam pembelajaran matematika terkait infrastruktur dan pemahaman konsep yang kompleks. Namun, keduanya menawarkan pengalaman pembelajaran yang kuat dan relevan dengan kebutuhan industri. Penelitian ini bertujuan membandingkan sistem pendidikan tinggi kedua negara serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan mereka, menggunakan metode deskriptif dengan sumber data beragam seperti laporan resmi, penelitian akademis, dan data statistik. Hasilnya menunjukkan bahwa Australia telah berhasil meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan melalui program diversifikasi dan beasiswa, sedangkan Inggris masih menghadapi tantangan besar dalam inklusi dan representasi. Temuan ini menawarkan wawasan penting tentang bagaimana kedua negara menghadapi tantangan pendidikan tinggi dan berupaya mengembangkan sistem yang lebih inklusif dan efisien. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dan institusi pendidikan dalam mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif, memanfaatkan keberhasilan Australia dalam diversifikasi dan aksesibilitas, serta mengatasi kendala yang dihadapi Inggris dalam upaya mencapai inklusi dan kesetaraan sosial dalam pendidikan tinggi.

Kata Kunci: Pendidikan Tinggi; Sistem Pendidikan Tinggi; Australia; Inggris

Abstract

Higher education in Australia and the UK has undergone significant transformation in recent decades, facing challenges of inclusion, representation and efficiency. In Australia, significant changes have occurred in higher education funding, moving to a more flexible and performance-based model, while the UK still struggles with issues of elitism and social inequality. Both countries face challenges in learning mathematics related to infrastructure and understanding complex concepts. However, both offer strong learning experiences that are relevant to industry needs. This research aims to compare the two countries' higher education systems and analyze the factors that influence the quality of their education, using a descriptive method with diverse data sources such as official reports, academic research and statistical data. The results show that Australia has successfully improved accessibility and equity through diversification and scholarship programs, while the UK still faces major challenges in inclusion and representation. The findings offer important insights into how both countries face the challenges of higher education and seek to develop more inclusive and efficient systems. This research can serve as a reference for governments and educational institutions in developing more effective education policies, capitalizing on Australia's success in diversification and accessibility, and overcoming the obstacles faced by the UK in its efforts to achieve inclusion and social equity in higher education.

Keywords: Higher Education; Higher Education System; Australia; UK

1. Pendahuluan

1.1 Sosiologi Pendidikan

Sosiologi pendidikan di Australia dan Inggris menggambarkan lanskap yang kompleks, mengeksplorasi sejumlah aspek penting yang meliputi aksesibilitas, kesetaraan, inklusi, dan dampak sosial dari pendidikan tinggi. Aksesibilitas dan Kesetaraan menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan partisipasi dalam pendidikan tinggi di kedua negara. Di Australia, berbagai langkah telah diambil untuk memperluas aksesibilitas, termasuk program diversifikasi, penawaran beasiswa, dan implementasi skema pinjaman pendidikan seperti HECS-HELP. Tujuannya adalah untuk mendorong inklusi sosial dan memastikan bahwa individu dari berbagai latar belakang memiliki kesempatan yang sama untuk mengejar pendidikan tinggi. Di Inggris, meskipun langkah-langkah serupa telah diambil, masih ada kekhawatiran tentang elitisme dan kesenjangan sosial dalam pendidikan tinggi. Biaya kuliah yang meningkat dan pemotongan dana publik telah menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan akses, memunculkan perdebatan yang terus berkembang tentang inklusi sosial dalam konteks pendidikan tinggi [2].

Tantangan inklusi dan representasi dalam pendidikan terus dihadapi di Australia dan Inggris, meskipun ada upaya meningkatkan diversitas siswa dan staf akademik. Studi dari lembaga seperti GALE Research Center di UTS Australia dan Departemen Sosiologi Pendidikan di UCL Inggris memberikan wawasan penting tentang upaya inklusi dan tantangannya. Pengaruh sosial dan budaya, seperti latar belakang keluarga dan status ekonomi, memengaruhi akses, partisipasi, dan hasil pendidikan. Penelitian dari ACER Australia dan IES Inggris memberikan wawasan lebih lanjut tentang pengaruh tersebut dalam pendidikan tinggi.

1.2 Ekonomi Dan Pendanaan Pendidikan

Selama dekade terakhir, pendanaan pendidikan tinggi di Australia telah mengalami perubahan signifikan yang dipengaruhi oleh kebijakan pendanaan berbasis permintaan yang diperkenalkan pada tahun 2012, sesuai dengan rekomendasi yang diusulkan dalam Tinjauan Bradley pada tahun 2008. Reformasi ini memperkenalkan pergeseran dari model sebelumnya yang berfokus pada pasokan, di mana pemerintah Australia memiliki peran yang lebih dominan dalam pengelolaan pendaftaran pendidikan tinggi, menuju sistem di mana pendanaan untuk program sarjana di universitas menjadi tidak terbatas. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam pendidikan tinggi, terutama di antara kelompok yang secara historis kurang terwakili di universitas Australia. Setelah beberapa tahun ketidakpastian kebijakan, pada tahun 2017, Pemerintah Australia mengubah pengaturan pendanaan pendidikan tinggi dengan mempertahankan prinsip tidak adanya batasan tempat di universitas, tetapi dengan membatasi peningkatan alokasi dana untuk institusi. Mulai tahun 2020, peningkatan alokasi dana lebih lanjut dikaitkan dengan pertumbuhan populasi dalam kelompok usia 18-64 tahun, sambil memperkenalkan langkah-langkah "berbasis kinerja" baru yang mempertimbangkan hasil kerja lulusan, kualitas pengalaman mahasiswa yang dilaporkan, dan tingkat partisipasi mahasiswa dari kelompok-kelompok ekuitas [3].

Kebijakan dan praktik institusional terkait mahasiswa internasional di Australia berdampak besar pada pendidikan tinggi. Reformasi pada tahun 2010-2013 mengurangi jumlah mahasiswa internasional, tetapi setelah peninjauan Knight pada tahun 2011, kriteria visa diperlonggar, mengurangi persyaratan keuangan dan memberikan lebih banyak kesempatan kerja bagi lulusan di Australia. Hal ini menjaga kontribusi finansial mahasiswa internasional terhadap pendidikan tinggi Australia, dan sejak 2014, jumlah mereka telah meningkat secara signifikan.

Sementara sektor pendidikan tinggi di Australia sebagian besar terdiri dari universitas negeri, ada juga sejumlah kecil universitas swasta dan penyedia pendidikan tinggi lainnya (OHEP) yang berkontribusi pada sektor ini. OHEP termasuk lembaga seperti sekolah tinggi teologi dan lembaga swasta khusus yang menawarkan program pendidikan tinggi seperti gelar sarjana. Pemerintah Australia memiliki peran penting dalam pendanaan pendidikan tinggi dengan menyediakan subsidi besar, yang memungkinkan biaya kuliah yang relatif terjangkau bagi mahasiswa domestik dan

internasional. Di samping itu, mahasiswa internasional di Australia diizinkan untuk bekerja paruh waktu hingga 20 jam per minggu untuk membantu membiayai studi mereka [4].

Di Inggris, biaya kuliah cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan Australia, dan pemerintah Inggris menyediakan beberapa skema pinjaman dan beasiswa untuk membantu mahasiswa membiayai pendidikan mereka. Namun, skema ini tidak selalu cukup untuk menutupi seluruh biaya pendidikan, sehingga banyak mahasiswa yang harus mengambil pinjaman komersial [5].

1.3 Sistem Pendidikan Negeri Dan Swasta

Di Australia, terdapat perbedaan antara universitas negeri dan swasta dalam hal pembiayaan dan pilihan program studi. Universitas negeri mendapatkan pendanaan yang signifikan dari pemerintah dan biasanya menetapkan biaya kuliah yang lebih rendah, khususnya untuk mahasiswa lokal. Sebaliknya, universitas swasta mengandalkan pendapatan dari biaya kuliah yang lebih tinggi dan kontribusi swasta, sehingga biaya kuliah di universitas swasta cenderung lebih tinggi. Meskipun demikian, universitas swasta menawarkan beragam program studi dan fleksibilitas waktu yang lebih besar, termasuk opsi kuliah malam dan online, yang dapat mengakomodasi mahasiswa yang bekerja paruh waktu atau memiliki keterbatasan waktu [6].

Sama seperti di Australia, Inggris memiliki universitas negeri dan swasta yang masing-masing didanai dan diatur secara berbeda. Universitas negeri di Inggris mendapatkan pendanaan yang signifikan dari pemerintah Inggris, sehingga biaya kuliahnya cenderung lebih terjangkau, terutama bagi mahasiswa Inggris dan Uni Eropa. Di sisi lain, universitas swasta di Inggris, sebagaimana halnya di Australia, menetapkan biaya kuliah yang lebih tinggi dan mengandalkan pendapatan dari biaya kuliah serta sumbangan swasta untuk operasional mereka. Meskipun demikian, baik universitas negeri maupun swasta di Inggris menawarkan berbagai pilihan program studi dan fleksibilitas waktu belajar, dengan universitas swasta cenderung memiliki struktur program yang lebih dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar kerja yang berubah [7].

1.4 Pengelolaan Pendidikan

Australia mengalami transformasi administratif yang mencerminkan paradigma New Public Management (NPM), yang menandai peralihan dari administrasi publik yang kaku menjadi manajemen publik yang lebih fleksibel dan berbasis pasar. Negara bagian seperti New South Wales, Australia Barat, Australia Selatan, dan wilayah utara menerapkan berbagai kebijakan pendidikan yang mencakup pembentukan komite sekolah, kelompok pembuat kebijakan sekolah, perampingan staf administrasi, dan desentralisasi manajerial.

Pengembangan profesionalisme di Australia diatur oleh departemen Pendidikan di masing-masing Australia Capital Territory (ACT). Di Australia Barat pengembangan profesionalisme guru diselenggarakan oleh Institute for Professional Learning. Dimana, institut ini menerima aplikasi dan menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan guru sesuai dengan jalur karier yang dipilihnya sendiri. Terdapat 3 jalur karier yang disediakan, yaitu: 1) guru senior (senior teacher), 2) guru kelas Tingkat 3 (level 3 classroom teacher), dan 3) administrator sekolah (school administrator). Jalur karier guru senior menyiapkan guru menjadi guru saja, tanpa dituntut keahlian khusus yang lain. Jalur guru kelas Tingkat 3 menyiapkan guru kelas dan keahlian khusus tertentu (misalnya leadership). Sedangkan jalur guru administrator sekolah menyiapkan guru untuk menjadi kepala sekolah ataupun kepala/wakil kepala dinas Pendidikan local (become a principal, deputy or head of a learning area). Pelaksanaan Pendidikan dan latihan dilaksanakan dengan menggunakan modul-modul diklat, baik online maupun cetak dan portofolio bagi jalur guru kelas Tingkat 3, kemudian diakhiri dengan assessment dan sertifikasi bagi yang lulus. Bagi guru negeri diberi biaya diklat sebesar \$1.600 pertahun. Ada tambahan penghasilan setelah memperoleh sertifikat sesuai jalur masing-masing, misalnya untuk guru senior mendapat tambahan penghasilan \$91.647 setiap bulannya [1].

Pengelolaan pendidikan di Inggris dipercayakan kepada beberapa entitas yang berbeda. Pertama, Departemen Pendidikan Inggris, di bawah pemerintahan pusat, bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan nasional dan memiliki kewenangan untuk mengawasi pendidikan di tingkat

nasional. Selain itu, terdapat Education Funding Agency (EFA) yang mengelola pembiayaan pendidikan, memberikan dana kepada sekolah yang memiliki kualitas dan kinerja yang baik. Badan Penjaminan Mutu (QAA) juga turut berperan dalam memastikan standar kualitas dan meningkatkan pendidikan tinggi di Inggris, memberikan akreditasi kualitas untuk universitas dan perguruan tinggi. Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam menerapkan kebijakan pendidikan di wilayahnya masing-masing, meskipun diawasi oleh pemerintah pusat. Selain itu, terdapat pilihan bagi orang tua untuk memilih sekolah negeri yang menyediakan pendidikan gratis untuk siswa usia 5-16 tahun, atau sekolah swasta yang memerlukan biaya. Sistem pendidikan Inggris memulai pendidikan dasar pada usia 5 hingga 11 tahun dan dilanjutkan dengan pendidikan menengah dari usia 11 hingga 16 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan menengah, siswa memiliki opsi untuk melanjutkan ke pendidikan lanjutan dan tinggi [8].

1.5 Proses Pembelajaran

Di Australia dan Inggris, proses pembelajaran di universitas terdiri dari berbagai pendekatan yang bertujuan untuk memberikan pengalaman pendidikan yang berkualitas kepada mahasiswa. Berikut adalah beberapa perbandingan tentang proses pembelajaran di kedua negara:

Di Australia, pendidikan tinggi umumnya mengadopsi pendekatan praktis yang berorientasi pada keterampilan, termasuk penggunaan studi kasus, proyek praktis, dan pengalaman langsung di lapangan kerja. Selain itu, universitas-universitas di Australia cenderung memiliki kelas-kelas kecil dan sesi diskusi yang aktif guna mendorong partisipasi mahasiswa serta interaksi antara mahasiswa dan dosen. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran juga semakin berkembang di Australia, dengan e-learning dan platform digital yang digunakan untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran [9].

Di Inggris, meskipun terdapat tradisi pembelajaran yang formal dan terstruktur, khususnya di universitas-universitas yang lebih tua, banyak institusi pendidikan tinggi kini beralih ke pendekatan pembelajaran yang lebih modern dan aktif. Hal ini tercermin dalam penekanan yang semakin besar pada pengajaran interaktif dan kolaboratif, termasuk melalui diskusi kelas, presentasi mahasiswa, dan proyek kelompok, sambil tetap memperhatikan pentingnya pembelajaran mandiri dan pengembangan keterampilan belajar sepanjang hayat bagi mahasiswa [10].

Kedua negara memiliki fokus pada peningkatan kualitas pembelajaran dan pengalaman mahasiswa melalui berbagai strategi dan pendekatan. Sumber-sumber tersebut memberikan wawasan tentang perkembangan terbaru dalam proses pembelajaran di Australia dan Inggris.

1.6 Sistem Evaluasi Pendidikan

Sebelum upaya reformasi Pendidikan seperti sekarang, Australia menggunakan system evaluasi eksternal yang ekstensif untuk menentukan kualifikasi siswa dan memberikan sertifikat atau diploma. Namun setelah perang dunia II, semua diserahkan ke sekolah untuk melakukan ujian pada level masing-masing setiap tahun kecuali pada Tingkat akhir Pendidikan menengah disaat ujian eksternal dilaksanakan. Selama bertahun-tahun system Pendidikan Australia menggunakan sistem evaluasi eksternal. Sesudah perang dunia II hampir semua ujian eksternal ini dihapuskan, dan pada Pendidikan dasar dan menengah, yang paling banyak dilakukan ialah kenaikan kelas siswa atas dasar usia. Hampir pada semua sistem, sekolah punya tanggung jawab melakukan ujian untuk setiap level setiap tahun kecuali pada Tingkat akhir Pendidikan menengah di saat ujian eksternal dilaksanakan. Pada hamper seluruh sistem sekolah, sertifikat pertama yang diterima siswa adalah pada akhir tahun Pendidikan ke-10 berdasarkan penilaian internal sekolah. Pemberian sertifikat yang lebih tinggi diberikan pada tahun Pendidikan ke-12, pada umumnya berdasarkan ujian eksternal. Pada ACT dan negara bagian Queensland, ujian internal sekolah yang sudah terakreditasi adalah sebagai pengganti ujian eksternal pada tahun Pendidikan ke-12. Untuk masuk ke universitas dan CAE (Center for Adult Education) pada umumnya diperlukan kualitas reformasi tertentu pada tahun Pendidikan ke-12, walaupun kebanyakan institusi memberikan kriteria tersendiri bagi orang-orang dewasa yang kebetulan tidak memenuhi persyaratan formal [1].

Sistem evaluasi pendidikan di Inggris Raya melibatkan berbagai metode penilaian dan dibagi dalam beberapa tahap utama. Pendidikan dasar dimulai pada usia 5-11 tahun, fokus pada mata pelajaran dasar. Pendidikan menengah berlangsung dari usia 11-16 tahun, dengan siswa mempersiapkan GCSE. Pendidikan lanjutan, untuk siswa di atas 16 tahun, mencakup program A-level, BTEC, atau vokasi lainnya, sementara pendidikan tinggi mencakup program sarjana, magister, dan doktoral. Penilaian dilakukan melalui ujian nasional seperti GCSE dan A-level, serta penilaian berkelanjutan oleh guru melalui tugas, proyek, dan laporan kemajuan. Lembaga seperti Ofqual, SQA, dan Qualifications Wales mengatur penilaian di berbagai wilayah Inggris. Sistem ini fokus pada keterampilan dan pengetahuan siswa, menggunakan metode beragam untuk penilaian komprehensif, dan menuntut akuntabilitas tinggi dari sekolah dan guru untuk mencapai target akademik yang ditetapkan pemerintah [11].

Sistem evaluasi pendidikan di Inggris memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya, sistem ini dirancang untuk mendorong siswa mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk sukses dalam hidup, serta membantu sekolah dan guru mengidentifikasi siswa yang membutuhkan dukungan tambahan. Namun, sistem ini juga memiliki kekurangan, di antaranya dapat menyebabkan stres bagi siswa karena banyaknya ujian yang harus mereka ikuti. Selain itu, fokus pada penilaian nasional dapat membuat guru terlalu terpaku pada kurikulum dan mengabaikan kebutuhan individu siswa [12].

1.7 Matematika di Australia dan Inggris

Perkuliahan jurusan matematika di Australia dan Inggris memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan yang signifikan. Australia dan Inggris dikenal memiliki sistem pendidikan yang sangat baik, dengan kurikulum yang terstruktur dan diperbarui secara teratur, sehingga jurusan matematika di kedua negara ini menawarkan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan industri. Kurikulum matematika di Australia disusun oleh Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA), sedangkan di Inggris disusun oleh National Curriculum. Kedua kurikulum ini memiliki struktur yang lengkap dan terorganisir, memungkinkan siswa untuk memahami konsep matematika dengan lebih baik. Pengalaman belajar di jurusan ini sangat baik, dengan materi yang relevan dan menarik, membantu siswa mengembangkan keterampilan analisis, berpikir kritis, dan komunikasi yang efektif. Namun, terdapat beberapa kekurangan, seperti keterbatasan akses internet yang stabil dan cepat untuk perkuliahan e-learning, terutama bagi siswa dengan akses internet yang buruk. Model pembelajaran Discovery Learning bisa memakan waktu lebih lama, menjadi tantangan bagi siswa dengan jadwal padat. Siswa yang kurang berpengalaman dalam matematika mungkin kesulitan memahami konsep kompleks dan memerlukan bantuan tambahan dari guru. Selain itu, jurusan matematika di kedua negara dapat menghadapi keterbatasan sumber daya, seperti peralatan dan infrastruktur, yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Keterbatasan dalam pengembangan keterampilan analisis dan berpikir kritis juga bisa mempengaruhi kemampuan siswa dalam menerapkan konsep matematika dalam kehidupan sehari-hari. Secara keseluruhan, meskipun memiliki kelebihan signifikan, jurusan matematika di Australia dan Inggris juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi [13].

Pada tingkat sarjana di Australia, program studi matematika berlangsung selama tiga tahun dengan beragam pilihan jurusan termasuk Matematika Murni, Terapan, Statistik, dan Aktuaria. Struktur program yang fleksibel memungkinkan penyesuaian dengan minat dan tujuan karir mahasiswa, sementara penekanan diberikan pada pengembangan pemahaman konseptual yang kuat dan kemampuan pemecahan masalah yang kompleks. Penilaian dilakukan melalui kombinasi tugas, ujian, dan proyek. Di sisi lain, di Inggris, program sarjana matematika juga berdurasi tiga tahun dengan pilihan jurusan yang lebih terfokus. Struktur program lebih terstruktur dengan lebih banyak mata kuliah wajib, dan penekanan diberikan pada penguasaan teknik matematika dan persiapan untuk studi pascasarjana. Penilaian dilakukan melalui ujian akhir modul dan tugas besar.

Meskipun demikian, keduanya memiliki persamaan dalam memberikan dasar yang kuat dalam matematika dan kemampuan pemecahan masalah kepada mahasiswa, serta menekankan pentingnya keterampilan berpikir kritis dan analitis. Perbedaan utama terletak pada fleksibilitas struktur program

dan penekanan pada pembelajaran mandiri di Australia, sementara Inggris menonjol dengan fokus pada penguasaan teknik matematika dan persiapan untuk studi lanjutan.

2. Metode

Metode penelitian yang dapat digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif. Metode penelitian deskriptif adalah pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena yang telah terjadi atau sedang terjadi. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan data yang telah dikumpulkan tanpa mencoba menjelaskan hubungan antar variabel atau membuat prediksi. Metode ini dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti sosial, psikologi, dan Pendidikan [14]. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau keadaan yang ada dengan cara yang sistematis dan akurat. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil dalam menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mempelajari topik tentang transformasi pendidikan di Australia dan Inggris: Pertama, mulailah dengan pengumpulan data yang relevan tentang transformasi pendidikan di kedua negara. Data ini dapat mencakup informasi tentang kebijakan pendidikan, praktik pengajaran, pendanaan pendidikan, sistem evaluasi, dan lain-lain. Sumber data dapat berupa dokumen resmi, laporan penelitian, artikel jurnal, dan wawancara dengan ahli pendidikan. Kedua, susunlah kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai panduan untuk analisis data. Kerangka konseptual ini dapat mencakup variabel-variabel yang relevan untuk memahami transformasi pendidikan, seperti kebijakan pendidikan, aksesibilitas, kualitas pembelajaran, pendanaan, dan proses evaluasi. Selanjutnya, lakukan analisis data dengan menggunakan teknik statistik deskriptif seperti frekuensi, persentase, mean, dan median untuk menggambarkan karakteristik dan tren dari data yang dikumpulkan. Analisis kualitatif juga dapat dilakukan untuk mengeksplorasi konsep-konsep yang lebih mendalam dan memahami konteks sosial dan budaya dari transformasi pendidikan. Setelah data dianalisis, interpretasikan hasilnya untuk mengidentifikasi temuan utama tentang transformasi pendidikan di Australia dan Inggris. Diskusikan implikasi hasil penelitian ini terhadap kebijakan pendidikan, praktik pengajaran, dan penelitian masa depan di bidang ini. Terakhir, susunlah laporan penelitian yang mencakup semua langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian, termasuk deskripsi metodologi, analisis data, temuan utama, dan kesimpulan. Pastikan laporan penelitian disusun secara sistematis dan akurat sesuai dengan standar penelitian ilmiah yang berlaku.

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini menggambarkan perbedaan yang signifikan antara sistem pendidikan di Australia dan Inggris serta implikasinya dalam konteks kebijakan dan praktik pendidikan. Pertama, dalam hal pendanaan pendidikan, ditemukan bahwa Australia mengadopsi pendekatan yang lebih inklusif dengan fokus pada partisipasi dan kesetaraan akses, yang tercermin dalam kebijakan seperti program diversifikasi dan penawaran beasiswa. Di sisi lain, Inggris memiliki sistem pendanaan yang lebih terpusat dengan biaya kuliah yang lebih tinggi, menekankan peran pasar dan swasta dalam pembiayaan pendidikan. Kedua, dalam praktik pembelajaran, Australia cenderung mengadopsi pendekatan yang lebih praktis dan terlibat, menekankan keterampilan dan pengalaman langsung di lapangan kerja. Sebaliknya, Inggris menonjol dengan kombinasi antara pembelajaran interaktif dan tradisional, dengan fokus pada penguasaan teknik matematika. Ketiga, terkait sistem evaluasi pendidikan, Australia lebih menekankan penilaian internal yang terintegrasi dengan kurikulum, sementara Inggris mengadopsi pendekatan yang lebih terpusat pada ujian nasional seperti GCSE dan A-level.

Dalam konteks matematika, kedua negara menghadapi tantangan dalam hal keterbatasan sumber daya dan infrastruktur, serta kesulitan dalam memahami konsep matematika yang kompleks. Namun, keduanya menawarkan pendekatan pembelajaran yang kuat dan relevan dengan kebutuhan industri, menyoroti peluang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran melalui penggunaan teknologi dan pengembangan keterampilan analisis.

Transformasi pendidikan di Australia dan Inggris melibatkan beberapa aspek yang signifikan, yang dapat diamati melalui kebijakan pendidikan, aksesibilitas, kualitas pembelajaran, pendanaan,

dan proses evaluasi. Dalam hal kebijakan pendidikan, kedua negara telah menerapkan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Misalnya, Australia dan Inggris telah melakukan reformasi pendanaan berbasis permintaan, yang memungkinkan lebih banyak kontrol atas dana pendidikan yang dialokasikan berdasarkan kebutuhan. Diversifikasi program pendidikan juga telah dilakukan untuk memberikan pilihan yang lebih luas bagi siswa, sementara pengembangan profesionalisme guru menjadi fokus untuk meningkatkan kualitas pengajaran. Upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi telah dilakukan, meskipun tantangan masih ada terkait elitisme dan kesenjangan sosial. Biaya kuliah dan kesetaraan akses masih menjadi isu kritis yang perlu ditangani lebih lanjut di kedua negara.

Dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, Australia dan Inggris telah mengadopsi pendekatan praktis dan interaktif dalam proses pembelajaran. Penggunaan teknologi telah menjadi alat penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas pembelajaran. Sistem pendanaan pendidikan di kedua negara memiliki perbedaan yang signifikan, terutama terkait biaya kuliah, skema pinjaman, dan dukungan pemerintah. Peran mahasiswa internasional juga tidak dapat diabaikan dalam mendanai sektor pendidikan tinggi di Australia dan Inggris. Evaluasi pendidikan, terdapat pergeseran dari evaluasi eksternal ke internal di Australia, sementara Inggris menekankan pada pembelajaran interaktif dan kolaboratif dalam sistem evaluasi pendidikannya. Jurusan matematika di kedua negara menawarkan pengalaman belajar yang relevan dengan kebutuhan industri, meskipun dihadapkan pada tantangan seperti keterbatasan akses internet dan sumber daya. Meskipun demikian, upaya terus dilakukan untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga. Secara keseluruhan, transformasi pendidikan di Australia dan Inggris merupakan hasil dari serangkaian kebijakan dan praktik yang beragam, dengan fokus pada peningkatan mutu, aksesibilitas, dan kualitas pembelajaran, serta adaptasi terhadap perubahan global dan lokal dalam pendidikan.

Implikasi kebijakan dari temuan penelitian ini sangat signifikan untuk pengembangan sistem pendidikan di Australia dan Inggris. Temuan ini menunjukkan perlunya reformasi dalam pendanaan pendidikan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana, serta perlunya upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Selain itu, peningkatan kualitas pembelajaran juga harus menjadi fokus utama dalam pembentukan kebijakan pendidikan di kedua negara. Meskipun terdapat tantangan seperti kesenjangan sosial dan keterbatasan sumber daya, penelitian ini juga membuka peluang untuk melakukan perubahan positif melalui kebijakan yang tepat dan penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran. Dengan mengidentifikasi tantangan ini, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, transformasi pendidikan di Australia dan Inggris menunjukkan upaya signifikan dalam menghadapi tantangan globalisasi dan meningkatkan kualitas pendidikan. Australia berhasil meningkatkan aksesibilitas dan kesetaraan melalui kebijakan yang progresif, sementara Inggris masih harus mengatasi tantangan elitisme dan kesenjangan sosial. Kedua negara dapat saling belajar dari keberhasilan dan tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang lebih efektif dan inklusif. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dan institusi pendidikan dalam upaya meningkatkan kualitas dan inklusivitas pendidikan, serta dapat dijadikan referensi bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia.

4. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa transformasi pendidikan di Australia dan Inggris melibatkan berbagai aspek yang kompleks dan bervariasi, mulai dari kebijakan pendanaan hingga praktik pembelajaran. Kedua negara telah mengadopsi langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk reformasi pendanaan berbasis permintaan, diversifikasi program pendidikan, dan pengembangan profesionalisme guru. Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan tinggi dan kualitas pembelajaran, tantangan seperti elitisme, kesenjangan sosial, dan keterbatasan sumber daya masih perlu diatasi. Implikasi kebijakan dari temuan ini menyoroti perlunya reformasi lebih lanjut dalam pendanaan pendidikan, peningkatan aksesibilitas,

dan peningkatan kualitas pembelajaran untuk memastikan bahwa sistem pendidikan di kedua negara dapat terus beradaptasi dengan perubahan global dan lokal dalam pendidikan.

Referensi

- [1] Z. Arifin, "Transformisme Pendidikan Di Negara Maju: Inisiatif Filosofis Pengembangan Mutu Di Indonesia," pp. 7823–7830, 2020.
- [2] J. Simpson and C. Smith, "Students, sex work and negotiations of stigma in the UK and Australia," *Sexualities*, vol. 24, no. 3, pp. 474–490, 2021, doi: 10.1177/1363460720922733.
- [3] P. Hurley and N. Van Dyke, "Australian investment in education : Higher education," Mitchell Institute, Melb., 2020.
- [4] Eurydice, *The Structure of the European Education Systems 2019/20*. 2019.
- [5] H. Winarso, Imamuddin Basuni, N. R. Rachman, and Wibisono, "Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah di 16 Negara," *Biro Perenc. dan Kerjasama Luar Negeri Kementeri. Pendidik. dan Kebud. Tahun 2014*, vol. 13, p. 248, 2021.
- [6] A. S. Maulida, D. D. Sepkamala, S. Herayani, and W. H. Ikrima, "Analisis Perbandingan Administrasi Publiknegara Inggris Dan Australia," *Pentahelix*, vol. 1, no. 2, p. 163, 2023, doi: 10.24853/penta.1.2.163-174.
- [7] S. Balok, "Model Budaya Pembentukan Karakter Dalam Sistem Pendidikan Di Jerman, Australia," *Indones. Character J.*, vol. 1, no. 1, pp. 25–36, 2023, doi: 10.21512/icj.v1i1.10246.
- [8] A. W. Syakhrani, Annisa, Evi, F. Hidayati, and H. Nisa, "Sistem Pendidikan Di Negara Australia," *Adiba J. Educ.*, vol. 2, no. 3, pp. 421–428, 2022, [Online]. Available: <https://adisampublisher.org/index.php/adiba/article/view/162>
- [9] S. Ega, "Profil Kepemimpinan Kepala Sekolah Dasar Negeri dan Swasta di Kabupaten Sumedang," *J. Manaj. Pendidik. J. Ilm. Adm. Manaj. dan Kepemimp. Pendidik.*, vol. 4, no. 1, pp. 63–78, 2023, doi: 10.21831/jump.v4i1.48239.
- [10] Arsilawita, Rusdinal, and A. Ananda, "Sistem Pendidikan Inggris Menjawab Tantangan Revolusi Industri 4.0," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 5, no. 1, p. 1177, 2021.
- [11] J. M. Lodge and K. Ashford-Rowe, "Intensive modes of study and the need to focus on the process of learning in Higher Education," *J. Univ. Teach. Learn. Pract.*, vol. 21, no. 2, 2024, doi: 10.53761/1.21.2.02.
- [12] Z. Nuryana, W. Xu, L. Kurniawan, N. Sutanti, S. A. Makruf, and I. Nurcahyati, "Student stress and mental health during online learning: Potential for post-COVID-19 school curriculum development," *Compr. Psychoneuroendocrinology*, vol. 14, no. January, p. 100184, 2023, doi: 10.1016/j.cpneec.2023.100184.
- [13] Soelaiman and T. A. Fauzi, "Sistem Pendidikan di Inggris," *Kant. Atase Pendidikan, Kedutaan Besar Republik Indones. London*, pp. 1–154, 2014, [Online]. Available: <https://atdikbudlondon.files.wordpress.com/2014/05/buku-sistem-pendidikan-di-inggris-edisi-22.pdf>
- [14] F. Soelaiman, *Sistem Pendidikan di Inggris*, no. January. 2021. [Online]. Available: <https://atdikbudlondon.files.wordpress.com/2014/05/buku-sistem-pendidikan-di-inggris-edisi-22.pdf>
- [15] R. Aysi, A. Ananda, and N. Gistituati, "Kurikulum Matematika Sekolah di Australia : Suatu Perbandingan dengan Indonesia," vol. 08, no. March, pp. 565–576, 2024.
- [16] D. S. Ruhansih, "Efektivitas Strategi Bimbingan Teistik Untuk Pengembangan Religiusitas Remaja (Penelitian Kuasi Eksperimen Terhadap Peserta Didik Kelas X SMA Nugraha Bandung Tahun Ajaran 2014/2015)," *QUANTA J. Kaji. Bimbing. dan Konseling dalam Pendidik.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–10, 2017, doi: 10.22460/q.v1i1p1-10.497.